

Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018

Wenny Eka Septina¹, Erisandi Arditama²,

¹Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

¹wennyeka@mail.unnes.ac.id, ²erisandi@mail.unnes.ac.id,

Abstrak

Pendidikan politik merupakan hal penting untuk dilakukan, mengingat maju tidaknya demokrasi tergantung pada tinggi rendahnya partisipasi politik. Perempuan merupakan aktor yang memiliki andil penting dalam pembangunan, termasuk dalam bidang politik. Perempuan berperan penuh dalam membangun bangsa, karena perempuanlah yang merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dalam politik, kiprah maupun partisipasi perempuan belum nampak signifikan. Perempuan masih sebatas objek pelengkap untuk meraup suara. Disisi lain, masih banyaknya perempuan yang masih berpendidikan rendah juga berpengaruh terhadap partisipasi politik, dikhawatirkan akan berakibat pada tingkat apatisme yang begitu tinggi. Ditambah lagi kondisi sosio-kultural masyarakat desa yang masih berkarakter patriarkhi dengan menekankan pada superioritas laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan kondisi ini, pendidikan politik bagi perempuan menjadi agenda mendesak untuk mencegah angka apatisme politik dalam bentuk golput dan meningkatkan partisipasi politik dalam alam demokrasi.

Kata Kunci: *Perempuan; Partisipasi Politik; Pendidikan Politik*

Political education is essential to do, as advanced democracy depends on high or low political participation. Women having a share is the important thing for development, including in politics. Role of women in developing a nation, because she is the first school for her children. In politics, gait and participation of women had not yet it is significant. Women still object to complement to scoop sound. On the other side, there are still many women who are still with low levels of education also influences political participation, it would result in the apathy so high. Added the sosio-kultural villagers still characterless patriarkhi by stressing superioritas. men against women. Based on this condition, political education for women on the subject to prevent in the form of a political apathy golput and increasing political participation in the democracy.

Keywords: *Women; Political Participation Political Education;*

Pendahuluan

Dalam sejarah manusia, posisi perempuan selalu dianggap inferior, dibawah superioritas laki-laki. Padahal jika

kita cermati, perempuan memiliki andil yang begitu besar dalam kehidupan ini. Bagaimana tidak, perempuan merupakan aktor utama yang memiliki peran teramat

besar dalam mendidik keluarga dan generasi penerus bangsa. Dalam perkembangannya perempuan dianggap pasif, dan selalu berada di bawah dominasi laki-laki. Minimnya akses perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif dan terus menerus dibebankan untuk melakukan kegiatan reproduktif membuat perempuan semakin miskin dan semakin terpuruk. (Vera AR Pasaribu, 2009). Meskipun telah ditetapkan kerangka kebijakan nasional untuk memajukan kesetaraan gender, tetapi kesenjangan dan hambatan yang signifikan terhadap upaya kesetaraan gender masih tetap ada: kemajuan dalam mengurangi angka kematian ibu masih lamban, partisipasi politik perempuan masih rendah dan perhatian pada potensi peran ekonomis perempuan juga masih sangat kurang. (Ringkasan Eksekutif, 2009)

Jika kini telah banyak perempuan yang berperan dalam ranah publik, tetapi pada umumnya mereka hanya terbatas pada kuantitas semata, belum berbicara mengenai kualitas. Artinya, dengan adanya kebijakan afirmasi yang mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebesar 30 persen, hanya berbicara pada jumlah keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam kualitasnya dengan keterwakilan dalam pengambilan keputusan,

perempuan belum mampu berbicara banyak. Oleh karena itu, agenda mendesak yang harus dilakukan adalah perlunya meletakkan kesetaraan gender sebagai prioritas jika ingin berevolusi menuju demokrasi yang benar-benar berfungsi dan menyadari tujuan-tujuan sosial, politik, dan ekonominya.

Pasca reformasi 1998, kehidupan masyarakat mengalami berbagai perubahan yang bertumpu pada pergeseran pola kehidupan politik yang semula otoritarian menjadi lebih demokratis. Dengan lahirnya reformasi, harapan akan terciptanya kehidupan yang demokratis bukan merupakan ilusi belaka. Hanya saja, setelah hampir dua puluh tahun berjalan, perkembangan demokrasi masih digugat dan pertanyakan, khususnya terkait dengan pemilihan umum. Praktik penyelenggaraan pemilu masih sebatas penyelenggaraan ritual lima tahunan yang, belum menyentuh pada keinginan bahwa pemilihan umum merupakan wadah yang begitu penting untuk meregenerasi tampuk kepemimpinan agar tercipta kondisi negara yang kondusif. Hal ini dibuktikan banyaknya kekacauan yang terjadi mulai dari kesemrawutan menjelang pemilu, proses pemungutan suara yang seringkali menimbulkan polemik antara pihak-pihak yang berkompetisi,

hingga masalah *money politic* yang belum juga menemukan titik terang penyelesaiannya. Bahkan, dalam kaitannya pemilihan umum di tingkat daerah, sistem dirubah menjadi pemilukada serentak dengan tujuan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari pemilukada. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum di negeri ini masih penuh masalah.

Melihat hal tersebut, agenda mendesak yang perlu dilakukan saat ini adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai pemilihan umum, sehingga tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang mungkin akan timbul dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pendidikan politik ini penting dilakukan karena hingga saat ini partai politik maupun pihak-pihak lain yang harusnya memberikan pendidikan politik ini belum mampu melaksanakan fungsi tersebut dengan baik. Idealnya, pendidikan politik ini diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat mempunyai pemahaman secara komprehensif mengenai pemilihan umum pada khususnya, dan kehidupan politik pada umumnya. Hanya saja, dalam usulan pengabdian ini, masyarakat sasaran dibatasi pada perempuan.

Perempuan dipilih sebagai sasaran kajian dilatarbelakangi pendapat yang menyebut partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat lemah baik pada demokrasi yang sudah mapan maupun yang baru tumbuh. Di Indonesia pun, meski perempuan mewakili sedikit lebih dari 50 persen populasi, keterwakilan mereka tidak proporsional pada semua tingkat pengaruh dan pengambilan keputusan, serta mereka tidak memiliki akses yang setara atas sumber daya dan keuntungan yang dapat diperoleh dari sumber daya itu. Ketimpangan keterwakilan demokrasi yang besar ini harus diakui dan diperbaiki. Dalam studi tentang partisipasi politik, sejumlah studi menemukan bahwa perempuan kurang berpartisipasi dalam politik dibandingkan laki-laki, terutama di luar kegiatan voting-seperti kampanye, membantu partai, dan meyakinkan orang lain agar memilih partai atau calon tertentu (Mujani, 2012)

Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, pendidikan politik diperlukan agar perempuan tidak terjebak dalam politik transaksional, dimana mereka hanya dijadikan obyek untuk meraup suara bagi kandidat yang bersaing. Dengan adanya pendidikan politik, diharapkan perempuan mampu menjalankan hak politiknya dengan

maksimal. Selain itu, dengan adanya pendidikan politik maka perempuan mampu menjalankan posisi tawarnya, karena biasanya kandidat akan membidik simpati masyarakat melalui hal-hal yang bersifat ekonomis. Selanjutnya, diharapkan mampu memberikan edukasi politik kepada keluarganya untuk dapat lebih berkiprah dalam ranah publik.

Pendidikan politik juga harus dilakukan terkait dengan pendidikan formal perempuan yang sebagian besar masih rendah. Sebab, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, potensi apatisisme politik akan tinggi. Ada banyak studi yang menjelaskan keterkaitan antara tingginya tingkat pendidikan dengan tingginya tingkat partisipasi politiknya (Lipset, 1980). Ditambah lagi kondisi sosio-kultural masyarakat desa yang masih berkarakter patriarkhi dengan menekankan pada superioritas laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan kondisi ini, pendidikan politik bagi perempuan menjadi agenda mendesak untuk mencegah angka apatisisme politik dalam bentuk golput dan meningkatkan partisipasi politik dalam alam demokrasi. Kondisi ini menemukan momentumnya di tengah persiapan pemilihan umum 2019 maupun pilkada serentak yang akan

dilaksanakan di beberapa daerah di waktu mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk mengungkap fenomena yang terkait dengan keberadaan upeti dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain penelitian ini mengungkap apa yang ada di balik perilaku masyarakat terkait realitas yang ada (Y.A Hilman. 2018).

Jenis data dalam tulisan ini antara lain hasil survei, surat kabar, dokumen, dan juga hasil penelitian lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dikodifikasikan kemudian dianalisis (Y.A Hilman. 2018)

Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu aset yang berharga bagi pembangunan bangsa dan negara. Data mengenai jumlah penduduk Indonesia dengan pembagian mengenai jumlah penduduk perempuan dan laki-laki ini penting untuk mengetahui potensi sumberdaya manusia yang ada. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 254,9 juta jiwa, dimana

jumlah penduduk perempuan adalah 126,8 juta jiwa dan laki-laki sebesar 128,1 juta jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Indonesia yang besar ini merupakan investasi dan aset bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Bagaimana tidak, jika dicermati lebih lanjut maka perempuan memiliki andil yang begitu besar dalam kehidupan. Perempuan merupakan aktor utama yang memiliki peran teramat besar dalam mendidik keluarga dan generasi penerus bangsa. Adanya konstruksi peran dalam masyarakat inilah yang menjadi awal mula lahirnya kajian tentang gender. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender telah menjadi prespektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan.

Posisi yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menyebabkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang dimaksud secara umum termanifestasikan dalam bentuk antara lain (Mansour, 2013) : (1) kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, (2) pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu *irrational* atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, (3) kekerasan yang pada umumnya dialami oleh perempuan. Bentuk kekerasan gender, seperti : pemerkosaan, pemukulan & serangan fisik yang terjadi dalam rumahtangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi KB, kekerasan terselubung (*molestation*), dan pelecehan seksual, dan yang terakhir (4) banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Anggapan kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumahtangga berakibat semua pekerjaan domestik rumahtangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini hampir

menyelimuti seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini semakin menjadi-jadi karena adanya beberapa aspek yang mendukungnya, seperti adanya dominasi budaya patriarkal yang lebih berfokus pada peran laki-laki; interpretasi ajaran agama yang mengajarkan bahwa perempuan merupakan kaum yang harus mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan suami, karena suami merupakan pemimpin; serta hegemoni negara yang begitu kuat yang masih didominasi oleh wajah maskulin.

Keterlibatan perempuan dalam politik sangat menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, wajah politik masih didominasi oleh gaya maskulinitas yang identik dengan pria. Politik identik sebagai bidang yang keras, saling menjegal, saling mematikan, dan *sikut-sikutan*. Tentu hal tersebut lebih bisa dilakukan pria, yang identik tenaga besar, tahan banting, serta rasional. Padahal jika kita kaji, perempuan merupakan sosok yang menjadi sekolah pertama bagi generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang akan memberikan sumbangan besar bagi pembangunan bangsa dan negara ke depan. Tentunya, hal ini juga dapat berefek pada kiprah perempuan dalam memajukan bidang politik. Seperti telah kita ketahui, politik merupakan salah satu bidang yang seksi dalam kehidupan. Bagaimana tidak, proses

setiap kebijakan pemerintah akan terkait dengan bidang ini mulai dari proses formulasi, implementasi, hingga evaluasinya. Dengan adanya paradigma yang lebih berfokus pada masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, maka masyarakat mempunyai ruang yang luas untuk dapat berkontribusi. Pun demikian dengan perempuan, harus mampu berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan politik negeri ini. Dengan sifat alami perempuan yang lebih teliti, berhati-hati, dan keibuan, diharapkan arah pembangunan politik kita bisa lebih humanis. Politik yang identik dengan dunia keras dan penuh intrik, bisa lebih beretika dan berkarakter, yang bukan hanya berorientasi pada kekuasaan semata tetapi lebih berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Perempuan dituntut untuk lebih berkiprah didunia politik, misalnya dengan memenuhi kebijakan afirmasi 30% bagi perempuan di lembaga perwakilan ataupun partai politik. Dalam skala minimal, paling tidak, perempuan harus berpartisipasi penuh dalam pemilu. Dengan memanfaatkan hak-hak politiknya, diharapkan perempuan dapat memberikan angin segar bagi kemajuan demokrasi negeri ini.

Untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis, salah satu kuncinya adalah

melalui pemilu. Pemilu sebagai gerbang demokrasi harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memilih pemimpin. Melihat pentingnya pemilu partisipasi perempuan perlu di dorong dan dimaksimalkan. Meskipun masih banyak perempuan yang belum mengenyam bangku pendidikan formal yang tinggi, diharapkan tidak berpengaruh pada partisipasi politik. Sebab, dengan tingkat apatisme yang tinggi maka tentu akan membahayakan proses demokratisasi.

Keterlibatan perempuan dalam politik begitu penting disebabkan beberapa hal sebagai berikut : pertama, partisipasi politik perempuan akan meningkatkan kesadaran akan hak politik perempuan. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama adalah bagian dari HAM. Begitupun dengan perempuan, kebebasan dan dorongan untuk dapat selalu mengembangkan diri dalam ranah publik umumnya dan politik khususnya merupakan bagian dari ham, sehingga implementasi dari hak-hak tersebut harus ditumbuhkembangkan dan didorong sehingga mencapai taraf maksimal. Selain itu, partisipasi politik perempuan juga penting karena terdapat wacana perlunya memasukan pandangan dari kelompok yang termarginalkan (seperti perempuan) dan melibatkan mereka dalam formulasi

kebijakan strategis. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan serta harapan-harapan seperti apakah yang dicita-citakan perempuan, hanya perempuan sendirilah yang mengetahuinya. Untuk itu, perlu didukung kiprah perempuan untuk berperan secara maksimal dalam dunia politik.

Hambatan Perempuan Dalam Politik

Meskipun perempuan memiliki peran yang besar dalam kehidupan, ternyata posisi perempuan di masyarakat masih dinomorduakan. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya perempuan yang berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perempuan masih mendapatkan stigma seperti masa-masa sebelumnya, selalu identik dengan hal-hal yang berbau privat dan mempunyai peran pokok sebagai ibu rumah tangga. Banyak sebab yang menjadi hambatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan, diantaranya hambatan diskursif/ideologis, sosio-ekonomi, politis dan kelembagaan, serta pribadi dan psikologis (Subekti, 2015).

Ketika kita mengkaji hambatan diskursif / ideologis, tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah publik justru datang dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah publik dan privat. Perempuan sebagai seorang warga negara yang bersifat

privat dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu hal yang wajar secara ideologis jika fungsi perempuan hanyalah mengurus rumah tangganya tanpa harus memikirkan kiprahnya di ranah publik.

Sementara itu, hambatan sosio ekonomi terjadi karena adanya budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogatif milik laki-laki. Sudah terbentuk tradisi, sikap, dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Perempuan 'seharusnya' dirumah, mengurus anak, suami, dan keluarganya. Ketika mereka memutuskan untuk bekerja di luar rumah, maka memiliki beban ganda. Hal inilah yang sering membuat perempuan untuk berpikir dua kali ketika ingin terjun langsung dalam kehidupan publik, khususnya politik.

Selanjutnya, hambatan politis dan kelembagaan muncul karena adanya sistem kepemiluan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik. Hal yang terjadi

adalah maka dukungan kekuasaan pun hanya berorientasi bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan, yang sebagian besar masih dikuasai oleh laki-laki. Partai-partai politik di Indonesia juga tidak berinvestasi dalam pengembangan kader mereka. Perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai, karenanya mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik. Bahkan yang lebih menyakitkan, perempuan sebatas dijadikan obyek untuk meraup suara saja dengan menonjolkan keluwesannya. Setelah itu, ikatan psikologis antara partai dan perempuan akan hilang seiring berakhirnya pelaksanaan pemilu. Disamping itu, budaya kelembagaan, praktik-praktik pengembangan sumber daya manusia, aturan dan sistem tata kelola masih bersifat sangat maskulin. Hal ini tentunya berekses negatif terhadap pembangunan diri perempuan untuk bisa melebarkan sayapnya ikut andil dalam perkembangan kehidupan politik.

Terakhir, hambatan pribadi dan psikologis muncul karena adanya identifikasi diri perempuan dengan peran reproduktif dan keutamaan melaksanakan tugas merawat keluarga mereka membentuk pilihan-pilihan mereka dalam berpartisipasi

di ranah politik dan publik. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik banyak disebabkan oleh persepsi tentang politik, dimana politik itu kejam, keras sehingga tidak cocok bagi kaum perempuan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan jiwa perempuan yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Sejak lahir, perempuan sudah terdidik untuk mandiri, tetapi dengan berbagai etika yang penuh kelembutan. Disisi lain, keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, yang berdampak pada tingginya jumlah buta huruf pada perempuan. Tak dapat dipungkiri, pendidikan seringkali menghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Pendidikan yang terbatas sering berakibat ada rasa percaya diri yang rendah dalam diri perempuan. Padahal, politik merupakan dunia yang membutuhkan rasa percaya diri tinggi, untuk bisa tampil dan berbicara di muka publik dengan berbagai ide dan inovasinya.

Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, maka strategi-strategi berikut dapat dilakukan :

1. Pelaksanaan pendidikan dan pengaktifan berbagai kegiatan yang berhubungan

dengan komunitas perempuan, dalam jangka pendek hal ini akan membantu perempuan untuk lebih aktif dalam mengoptimalkan perannya.

2. Memberikan sosialisasi politik secara berkesinambungan kepada perempuan, agar perempuan dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam politik. Sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan komunitas perempuan, seperti pertemuan rutin PKK, arisan, maupun pertemuan-pertemuan lain. Sosialisasi yang diberikan bisa mengenai mekanisme pemilihan umum, mulai dari mekanisme pra pemilu, saat pemilu, hingga pasca pemilu. Dengan memberikan pemahaman ini diharapkan masyarakat menjadi mengerti proses-proses politik jelang, saat, maupun setelah pemilu sehingga potensi masyarakat hanya dijadikan lumbung suara semata bisa diminimalisir. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki kepekaan untuk mengawal setiap proses politik yang terjadi sehingga masyarakat tetap menjadi konstituen yang diperhatikan. Bukan menjadi tempat meraup suara jelang pemilihan saja. Sosialisasi yang diberikan tentunya harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Dengan pendidikan politik diharapkan perempuan mampu menempatkan dirinya bahwa perempuan merupakan garda terdepan dalam pembangunan, khususnya dalam bidang politik. Dengan partisipasi perempuan dalam politik, diharapkan perempuan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Melalui pendidikan politik ini, diharapkan masyarakat mampu menjalankan hak politiknya dengan maksimal. Dengan adanya pendidikan politik ini maka perempuan mampu menjalankan posisi tawarnya yang lebih tinggi. Diharapkan perempuan mampu memberikan edukasi politik kepada keluarganya sehingga angka partisipasi politik dalam pemilu dapat mencapai angka yang tinggi, serta dapat memberikan dorongan dan dukungan bagi perempuan untuk dapat lebih berkiprah dalam ranah publik.

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Lipset, Seymour Martin. (1980). *Political Man*. Michigan: The University of Michigan Press.

Mujani, Saiful, William Liddle, Kuskrido Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan Media Utama.

Pasaribu, Vera AR. 2009. *Perempuan dan Pembangunan Nasional Indonesia*. Karya Ilmiah. Universitas HKBP Nommenses.

Ringkasan Eksekutif. *Kajian Gender Dalam Proyek Pembangunan Berbasis Komunitas: Implikasi Bagi PNPM Mandiri*. Indonesia-World Bank-ADB.

Subekti, Valina Singka. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Y.A Hilman, (2018). Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi pada Kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Wacana Politik*, (3)1, 29 -39, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.15472>.

Y.A Hilman, (2018). Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia. *Historia*, (6)2, 309 - 320, [10.24127/hj.v6i2.1268](https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1268)